

ABSTRAK

ANALISIS PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 36 K/Pdt.Sus/2012)

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi maka pembangunan sarana dan prasarana publik dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang / jasa yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah serta diikuti oleh banyak pelaku usaha yang saling berkompetisi didalamnya. Pelaku usaha yang menawarkan harga paling ekonomis dengan kualitas terbaik ditetapkan sebagai pemenang tender. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi persaingan tidak sehat didalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji persekongkolan tender dalam pengadaan barang / jasa pada instansi pemerintah; mengkaji upaya hukum terhadap putusan KPPU dalam perkara persekongkolan tender; serta menganalisis putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara persekongkolan tender pengadaan barang atau jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2009.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta literatur hukum. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian ini adalah persekongkolan tender dalam pengadaan barang / jasa pada instansi pemerintah dapat terjadi di semua tahapan pengadaan dengan melibatkan para peserta dan panitia tender. Upaya hukum terhadap putusan KPPU dapat melalui keberatan kemudian kasasi akan tetapi didalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang ketentuannya masih belum diatur didalam peraturan perundangan-undangan. Putusan Majelis Hakim kasasi sudah tepat dengan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena putusannya telah melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 sehingga mengakibatkan disparitas putusan, namun dalam putusan lainnya Majelis Hakim kasasi tidak memberikan pertimbangan yang jelas sehingga menimbulkan kerancuan didalam eksekusi putusan.

Saran dari penelitian ini adalah penegakkan hukum terhadap persekongkolan tender harus dilakukan secara konsisten dengan melibatkan semua elemen masyarakat, perlu adanya pendidikan dan pelatihan khusus yang mendalam terkait hukum persaingan usaha bagi para hakim, menghimbau kepada pembuat undang-undang untuk segera melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengingat persaingan usaha kedepan akan semakin kompetitif.

Kata kunci : *persekongkolan tender, pengadaan barang / jasa, instansi pemerintah.*

ABSTRACT

TENDER CONSPIRACY ANALYSIS IN THE PROCUREMENT OF GOODS OR SERVICES AT GOVERNMENT INSTITUTIONS (Case study : Supreme Court Decision Number : 36 K/Pdt.Sus/2012)

In realizing good and clean governance which is free from corruption, the development of public facilities and infrastructures is performed through the procurement mechanism of goods and services held by the government institutions and followed by many businesses who compete each other in it. The businesses who offer the most economical price with the best quality are determined as the tender winner. However, in practice, there were still many unfair competitions in the procurement of goods and services.

This research aims to examine the tender conspiracy in the procurement of goods and services at government institutions, to examine the legal efforts against KPPU decision, and to analyze the cassation decision on the case of tender conspiracy of the procurement of goods or services at the Public Work Agency of Bina Marga in Ogan Komering Ulu Regency in the budget year of 2009.

The research used normative-juridical method with analytical-descriptive referring to legal norms, judicial decisions, and legal literatures. The data obtained was selected and arranged systematically then analyzed qualitatively to answer the problems.

The results of this research were the tender conspiracy in the procurement of goods or services at government institutions might occur in all procurement processes involving the tender participants and committee. The legal efforts against KPPU decision can be through the Objection, and then Cassation, but the implementations still have some obstructions which are not regulated in law. The Decision of the cassation has right to annul the verdict of the District Court Judges because the verdict has violated the provisions of the Supreme Court Regulation No. 3 of 2005 and resulting disparity decision. But in others decision the judges of cassation did not give clearly consideration and causing ambiguity in the execution of decision.

The recommendation of this research is the law enforcement against tender conspiracy must be performed consistently by involving all elements of society. In addition, in-depth education and specific training concerning in business competition law are also necessary for judges. Finally, it urged legislators to revise immediately the Law No. 5 of 1999 because business competition in the future more competitive.

Keywords: tender conspiracy, procurement of goods / services, government institution.